

**BUDAYA POLITIK MASYARAKAT SUKU SASAK DALAM PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG  
(STUDI DI DESA PRINGGAJURANG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

**Arsiandi Dian Hapizin\*, Syafruddin, M. Mabror Haslan**

Program Studi PPKn, Universitas Mataram

\*Email: Arsiandidh07@gmail.com

**Abstrak** - Budaya politik di suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan budaya politik masyarakat lainnya, berdasarkan hal tersebut, tipe-tipe budaya politik dapat digolongkan dalam beberapa tipe, antara lain: budaya politik parokial, budaya politik subjek/kaula dan budaya politik partisipan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2013 di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun Informan dan subyek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang memiliki ciri budaya politik subyek/kaula dengan kecenderungan sikap dan orientasi politik yang bersifat afektif (perasaan) dalam menentukan pilihan politiknya sebagian besar memilih berdasarkan faktor afektif (perasaan). Budaya politik partisipan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilukada secara langsung di Kabupaten Lombok Timur yang sudah cukup tinggi, yang dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk ikut serta melakukan pencoblosan tanpa paksaan dari orang lain, partisipannya disini adalah partisipan pasif karena masyarakat ikut melakukan pencoblosan dikarenakan ingin memilih salah satu pasangan yang diusung oleh salah satu organisasi keagamaan yakni NW.

**Kata kunci:** *budaya politik; pemilihan umum kepala daerah.*

**Abstract** - *Political culture in a particular society will be different from another peoples political culture, based on it, the types of political culture can be classified into several types, including: parochial political culture, subject political culture and participant political culture. The purpose of this study is to describe the Political Culture of the Sasak Tribe Society in the Direct Regional Head Election in East Lombok Regency in 2013 at Pringgajurang Village, East Lombok Regency. This research uses qualitative approach with descriptive method. The informants and subjects in this study were determined using Purposive Sampling technique. Then the data that have been collected is analyzed descriptively through data reduction step, data presentation, and conclusion. The result of the research shows that the people of Pringgajurang Village have the characteristic of the subject's political culture with the tendency of affective attitude and political orientation in determining their political choice mostly based on the affective factor (feeling). The political culture of participants is seen from the level of community participation in the direct election in East Lombok regency which is already high enough, where the community already has awareness to participate in voting without coercion from others, the participant here is the passive participant because the community participate in voting because choose one of the couples carried by one of the religious organizations namely NW.*

**Keywords:** *political culture; general election of regional head.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan dan lain sebagainya termasuk di dalamnya keragaman budaya politik. Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta orang dimana mereka tinggal tersebar dipulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari

pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan hingga perkotaan. Di antara banyak suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain Suku Dayak di Kalimantan, Suku Baduy di Banten, Suku Bugis di Makasar, Suku Sasak yang ada di Pulau Lombok dan masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu suku bangsa yang berada di negara Indonesia adalah Suku Sasak. Suku *Sasak* adalah penduduk asli Lombok dan kelompok etnis mayoritas yakni lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk Pulau

Lombok. Etnik lain yang mendiami Pulau Lombok diantaranya Bali, Sumbawa, Jawa, Arab dan Cina. Diantara etnik pendatang ini, etnik Bali yang terbesar kedua dari jumlah penduduk Pulau Lombok. Orang Bali terutama tinggal di daerah Lombok Barat, kota Mataram dan Lombok Tengah.

Secara psikologis dan kultural, karakteristik masyarakat Suku Sasak cenderung bersifat paternalistik. Dimana figur kharismatik historis menjadi kemestian sebagai tempat menyandarkan masalah-masalah sosial politik dan agama (Syakur, 2006). Dalam bidang politik, terdapat tokoh-tokoh yang mewarisi *darah biru* politik kerajaan, sehingga ditemukan beberapa istilah gelar keturunan seperti *Datu, Raden, Lulu dan Baiq*.

Dalam bidang keagamaan terdapat *Tuan Guru* yang memainkan peran sebagai pelaksana masalah infrastruktur politik. Dari *Tuan Guru* ini lahir kebijakan dan pemahaman agama yang dikonsumsi oleh masyarakat Suku Sasak dalam menjalani ajaran Islam. Dalam perkembangannya sebagai umat Islam, masyarakat Suku Sasak kemudian menjadi masyarakat yang paternalistik, fanatik dan memiliki kultus yang tinggi terhadap *Tuan Guru*.

Semua yang dikatakan *Tuan Guru* dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri (Azra, 1999)

Dalam tataran politik, Pada masa orde baru *Tuan Guru* hanya dijadikan sebagai juru kampanye atau sebagai lumbung suara pada hajatan lima tahunan. Pada tingkatan legislatif maupun eksekutif *Tuan Guru* tidak memiliki peran apa-apa, akan tetapi beda halnya dengan kaum *Menak* atau bangsawan yang banyak mengisi jabatan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, tanpa memperoleh jabatan apapun *Tuan Guru* hanya sebagai legitimasi pada tataran keagamaan.

Munculnya reformasi politik pasca orde baru, memberikan ruang kepada *Tuan*

*Guru* untuk terjun dalam bidang politik. Hal ini juga menambah dinamika baru dalam politik masyarakat Suku Sasak dan juga bangkitnya politik Islam yang diwakili oleh para *Tuan Guru*. Pencalonan *Tuan Guru Bajang* pada pemilukada tahun 2008 di NTB memberikan bukti bahwa tokoh agama tidak hanya sebagai pemimpin keagamaan, melainkan juga dapat memimpin pemerintahan. Dalam pencalonan *Tuan Guru Bajang* ini juga memberikan warna pada dinamika politik pada masyarakat sasak yang sebelumnya selalu dikuasai oleh golongan *Menak*. Kemenangan *Tuan Guru Bajang* ini bukan hanya dikarenakan faktor ketokohan yang dimilikinya, melainkan juga memiliki modal sosial yang cukup, memiliki masa yang jelas dan momentum yang tepat (Setiawan, 2014).

<http://www.kompasiana.com/agusdediputra> wan diakses pada tanggal 20 maret 2017 pukul 21.30 Wita)

Runtuhnya masa orde baru berdampak besar terhadap sistem pemerintahan dan sistem politik yang ada di negara Indonesia. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah pemilihan umum kepala daerah yang secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan dari pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang ini menekankan bahwa pemilihan umum kepala daerah baik Gubernur, Bupati Dan Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 56 ayat (1)) dan melalui partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga

dapat berasal dari pasangan calon perorangan yang didukung oleh sejumlah orang (Pasal 59 ayat (1)). Kehadiran Undang-Undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui pemilukada secara langsung.

Dalam konteks Pemilihan umum kepala daerah budaya politik sangat berpengaruh terhadap pilihan seseorang dalam Pemilukada. Karena akan menentukan kearah mana seseorang itu menentukan pilihannya. Jika seseorang memiliki orientasi kognitif tentunya dalam menentukan pilihannya seseorang tersebut akan mempertimbangkan aspek pengetahuan, pengetahuan yang dimaksud disini adalah seorang tersebut akan melihat bagaimana *track record* dari calon pasangan tersebut, apakah layak atau tidak untuk dipilih sedangkan orientasi afektif bergerak didalam konteks perasaan. Perasaan-perasaan (emosi) yang bermain seperti perasaan diperhatikan, diuntungkan, diperlakukan dengan adil, ditolong, disejahterakan ataupun sejenisnya. Yang terakhir disini adalah seseorang yang memiliki orientasi evaluatif, dalam menentukan pilihannya menggabungkan antara keduanya yakni kognitif dan afektif (Almond dan Verba 1984).

Dalam proses pemilihan dan penentuan pilihan, strata pendidikan dan tingkat ekonomi seseorang juga sangat menentukan kemana arah pilihan seseorang akan berlabuh. Orang yang pendidikannya tinggi sudah pasti akan berfikir dan menganalisis terlebih dahulu visi-misi dan *track record* calon yang dipilihnya, jika visi-misi dan *track record* salah satu pasangan calon menurutnya sejalan dengan keinginannya, maka orang tersebut sudah pasti akan memilihnya. Lain halnya dengan pemilih yang berpendidikan rendah dan ekonominya rendah, orang yang

berpendidikan rendah justru akan mudah terpengaruh dan terpedaya oleh pihak-pihak yang menggunakan segala cara, seperti adanya kampanye hitam.

Faktor ekonomi juga sering digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahan contohnya seperti dengan menggunakan politik uang. Politik uang dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak (Sarundajang, 2005).

Pada Pemilukada Lombok Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 di Desa Pringgajurang sendiri terdapat 9 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 3184 jiwa. Hasil rekapitulasi yang dilaksanakan pada tingkat desa tanggal 13 Mei 2013 yakni pasangan Alkhaer mendapat 957 suara, Wali mendapat suara 551 suara, SUFI mendapat suara 679, dan pasangan Mafan mendapat perolehan suara sebanyak 71 suara. Jumlah suara yang sah sebanyak 2258 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 153 suara, sehingga total suara yang terkumpul dalam Pemilukada yang dilaksanakan di desa Pringgajurang sebanyak 2411 suara. (Sumber: PPS Desa Pringgajurang).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah. “Bagaimana Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2013 di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur”?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah. “Untuk

mendeskripsikan Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2013 di Desa Pringgajurang, Kabupaten Lombok Timur”.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan tentang budaya politik masyarakat Suku Sasak pada Pemilihan umum kepala daerah tahun 2013 di desa Pringgajurang. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014).

Penelitian ini dilakukan di Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Alasan peneliti memilih desa Pringgajurang karena terdapat fenomena politik yang menarik diantaranya tingkat partisipasi politik atau keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan politik untuk memilih bupati dan wakil bupati pada Pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Kabupaten Lombok Timur . Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni dari bulan Agustus sampai September 2017.

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria yaitu orang-orang yang sudah memiliki

pengalaman, pengetahuan, dan kecakapan yang berkaitan dengan budaya politik masyarakat Suku Sasak di Desa Pringgajurang serta memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai data-data dan dokumen seperti jumlah daftar pemilih tetap, hasil pemilukada pada tahun 2013, serta kondisi sosial, politik dan budaya yang ada di Desa Pringgajurang. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa Pringgajurang, Ketua PPS Desa Pringgajurang, Tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan masyarakat Desa Pringgajurang.

Subyek penelitian menurut Arikunto (2010) adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini penentuan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Beberapa masyarakat Desa Pringgajurang yang berpendidikan lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas dan lulusan perguruan tinggi. Mereka merupakan masyarakat Desa Pringgajurang yang bermata pencaharian sebagai petani, tukang, buruh tani, peternak, guru dan lain-lain.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti tidak hanya serta merta menarik kesimpulan berdasarkan data mentah yang didapatkan akan tetapi melalui beberapa proses pengelolaan data sehingga menjadi data yang layak untuk dikonsumsi publik, teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) analisis data yang dilakukan melalui tahap-tahap yakni tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

a. Deskripsi data hasil wawancara informan penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dan subyek penelitian terkait budaya politik masyarakat suku Sasak pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Desa Pringgajurang. Dari data hasil wawancara dengan informan penelitian maka dapat dijelaskan bahwa budaya politik masyarakat Desa Pringgajurang di satu sisi partisipan di satu sisi subyek atau kaula yang dimana dapat kita lihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Pringgajurang pada pemilukada tahun 2013 kemarin sudah cukup tinggi yakni sekitar 70 %, tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat sudah relatif maju, yang dimana tingkat pendidikan dan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dan pilihan masyarakat pada pemilukada tahun 2013 kemarin, kecendrungan sikap dan orientasi politik masyarakat Desa Pringgajurang masih bersifat afektif, kecendrungan orientasi yang bersifat afektif ini terbukti dengan pernyataan informan bahwa di desa pringgajurang ini yang berpengaruh adalah NW baik Anjani maupun Pancor, hal ini juga berpengaruh terhadap suara dari pasangan calon WALI dan SUFI yang cukup banyak. Masyarakat Desa Pringgajurang sudah memiliki kesadaran dan perhatian terhadap sistem politik yang ada contohnya seperti masyarakat sudah melakukan diskusi dan mengikuti berita-berita politik yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur baik dari media cetak maupun elektronik. Peran masyarakat masih pasif dalam hal menolak maupun menerima sebuah kebijakan.

b. Deskripsi data hasil wawancara subyek penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subyek penelitian terkait budaya politik masyarakat suku Sasak pada pemilihan umum kepala daerah secara langsung di Desa Pringgajurang subyek penelitian mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melakukan pencoblosan tanpa paksaan dari orang lain, pada saat pemilukada tahun 2013 kemarin, subyek melakukan diskusi mengenai masalah politik dan selalu mengikuti perkembangan berita politik yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur melalui media cetak maupun elektronik, subyek mempunyai kecendrungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik bersifat afektif terbukti dengan pilihan sebagian besar subyek penelitian pada pemilukada tahun 2013 kemarin yang memilih pasangan SUFI maupun Wali.

Budaya politik masyarakat suku Sasak dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung pada tahun 2013 di Desa Pringgajurang.

1. Budaya Politik Subjek/Kaula

Dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik subjek/kaula dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat yang relatif maju Hal tersebut sesuai dengan pendapat Almond dan Verba (1987) mengungkapkan Budaya politik kaula (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif.

Tingkat ekonomi masyarakat yang relatif maju ini sedikit tidak akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat pada saat pemilukada berlangsung, karena seringkali faktor ekonomi sering di gunakan sebagai sarana untuk memperoleh suara, seperti dengan

menggunakan politik uang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sarundajang (2005) mengungkapkan politik uang dilakukan supaya rakyat memilih calon yang sudah memberinya uang. Pada kenyataannya dengan uang memang dapat membeli segalanya. Selain itu, dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2013 kemarin, secara keseluruhan di Desa Pringgajurang tidak terdapat politik uang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat yang relatif maju ini akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat pada tahun 2013 kemarin, sehingga dalam pelaksanaannya secara keseluruhan di Desa Pringgajurang tidak terdapat politik uang.

Pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2013 kemarin, terdapat faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, diantaranya faktor perasaan (afektif). Seseorang yang menentukan pilihan berdasarkan perasaan (afektif) maka akan membentuk budaya politik subjek/kaula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Almond dan Verba (1987) mengungkapkan Dalam sebuah masyarakat yang mempunyai kecendrungan sikap dan orientasi politik dengan karakteristik yang bersifat afektif, maka akan membentuk budaya politik yang bersifat kaula atau subjektif.

Aspek afektif atau perasaan yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor (politisi) dan

penampilannya, dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif dan yudikatif) (Almond dan Verba, 1987). Adapaun hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dikarenakan faktor dari calon tersebut (aktor politik). Hal tersebut sesuai dengan data hasil penelitian mengatakan:

Adapun masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang masih sangat militant terhadap NW, sehingga pada saat pelaksanaan pemilukada tahun 2013 kemarin sebagian besar masyarakat memilih pasangan calon yang diusung oleh NW, baik NW Anjani maupun NW Anjani. Hal tersebut sesuai dengan data hasil penelitian mengatakan:

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik subjek/kaula dilihat dari alasan memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni dalam menentukan pilihannya masyarakat memilih berdasarkan aspek afektif atau perasaan. Dalam menentukan pilihannya masyarakat sebagian besar memilih pasangan calon yang diusung oleh NW, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang masih militant terhadap NW, sehingga pada saat pemilukada tahun 2013 kemarin di Desa Pringgajurang suara yang didapat oleh calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh NW baik NW Anjani maupun Pancor cukup banyak.

## 2. Budaya Politik Partisipan

Dilihat dari tingkat kesadaran politik masyarakat pada pada pemilukada tahun 2013 kemarin, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki

tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi, sehingga masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik partisipan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Almond dan Verba (1987:18) mengungkapkan Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Desa Pringgajurang yang sangat tinggi terlihat ketika pelaksanaan pemilu pada tahun 2013 kemarin berlangsung yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati ini cukup tinggi. Hal tersebut sesuai dengan data hasil penelitian mengatakan:

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang membuat tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi pada masyarakat Desa Pringgajurang ini dikarenakan dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2013 kemarin masyarakat Desa Pringgajurang sudah memiliki kesadaran untuk turut serta dalam melakukan pencoblosan pada saat pemilu pada tahun 2013 kemarin tanpa paksaan dari orang lain. Hal tersebut sesuai dengan data hasil penelitian mengatakan:

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Pringgajurang yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk turut serta dalam melakukan pencoblosan pada saat pemilu pada tahun 2013 kemarin tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga

masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik partisipan dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti pencoblosan. Meskipun masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan akan tetapi partisipannya adalah partisipan pasif karena masyarakat ikut melakukan pencoblosan dikarenakan ingin memilih salah satu pasangan yang diusung oleh salah satu organisasi keagamaan yakni NW.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pringgajurang merupakan masyarakat yang memiliki ciri budaya politik subjek/kaula hal tersebut dapat terlihat dari kecenderungan sikap dan orientasi politik masyarakat desa Pringgajurang bersifat afektif (perasaan) yang dimana dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu pada tahun 2013 kemarin, masyarakat Desa Pringgajurang sebagian besar memilih berdasarkan faktor perasaan atau afektif. Budaya politik partisipan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu secara langsung di Kabupaten Lombok Timur sudah cukup tinggi, yang dimana masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk ikut serta melakukan pencoblosan pada saat pemilu pada tahun 2013 kemarin tanpa paksaan dari orang lain. Partisipannya disini adalah partisipan pasif, karena masyarakat ikut melakukan pencoblosan dikarenakan ingin memilih salah satu pasangan yang diusung oleh salah satu organisasi keagamaan yakni NW.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Almond, G. A & Verba, S. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik Dan*

- Demokrasi Di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azra, A. 1999. *Konteks barteologi Indonesia; pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina. Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya offset.
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta.
- Setiawan, Agus dedi. 2014. *Tuan Guru Sebagai Alat Kampanye “Refleksi Dari Buruknya Politik Kampanye Di Indonesia,*  
[Http://www.kompasiana.com/agusdediputrawan](http://www.kompasiana.com/agusdediputrawan), Diakses pada 20 maret 2017 pukul 21.30 Wita.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syakur, A. A. 2006. *Islam Dan Kebudayaan, Artikulasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press.